

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan pada 121 kabupaten/kota di Indonesia yang telah melakukan pengalihan PBB-P2 tahun 2011-2013. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan penerimaan PBB-P2. Sesuai dengan pengujian hipotesis yang telah dilakukan menggunakan uji *Wilcoxon Signed Ranks Test* maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan penerimaan PBB-P2 sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Kenaikan penerimaan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 diduga karena (a) penerimaan PBB-P2 pemerintah kabupaten/kota memperoleh 100% penerimaan PBB-P2. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, penerimaan PBB-P2 pemerintah kabupaten/kota hanya memperoleh bagi hasil sebesar 64,8%, (b) sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, PBB masih mengacu pada Undang-Undang PBB sehingga tarif yang dikenakan sebesar 0,5%, dengan NJKP sebesar 20% jika Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) < 1 Miliar atau 40% jika Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ≥ 1 Miliar. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tarif yang digunakan paling tinggi sebesar 0,3% dengan tanpa mempergunakan NJKP, dan (c) adanya pengalihan PBB-P2, pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk mengelola PBB-P2 daerahnya masing-masing. Dengan demikian, upaya-upaya peningkatan penerimaan PBB-P2 dapat terus ditingkatkan, baik melalui

intensifikasi maupun ekstensifikasi. Salah satu contohnya, pemerintah daerah dapat memperbaharui data objek dan subjek pajak secara bertahap sesuai dengan kondisi lapangan, sehingga akurasi data terjamin.

5.2. Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini masih terdapat kelemahan, hal ini dimungkinkan karena secara keseluruhan jumlah kabupaten/kota di seluruh Indonesia tahun 2011-2014 yang harus melakukan pengalihan PBB-P2 sebanyak 492 kabupaten/kota. Sampel penelitian ini hanya menggunakan sebanyak 121 kabupaten/kota di Indonesia yang telah melakukan pengalihan PBB-P2 tahun 2011-2013.

REFERENSI

- Ariwirawan, S. 2014. Analisis Implementasi dan Peranan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Sinjai. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Baharuddin, R. 2013. Analisis Kesiapan Pemerintah Kota Makassar Menyambut Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2013. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Darwin. 2011. Pendaerahan PBB. *Artikel Pajak*. Diakses dari <http://www.bppk.depkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/12252-pendaerahan-pbb>, pada tanggal 16 Maret 2015.
- Hartono, J. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPFE.
- Hutagalung, N. L. 2014. Analisis Perbedaan PAD Sebelum dan Sesudah Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB-P2). *Skripsi*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2012. Booklet PBB. Diakses dari <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/BookletPBB.pdf>, pada tanggal 27 Februari 2015.
- Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak. 2012. Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai Pajak Daerah. Diakses dari <http://www.pajak.go.id/content/pengalihan-pbb-perdesaan-dan-perkotaan>, pada tanggal 27 Februari 2015.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. 2012. Data Keuangan Daerah Setelah TA 2006, diakses dari <http://www.djpk.depkeu.go.id/data-series/data-keuangan-daerah/setelah-ta-2006>, pada tanggal 16 Februari 2015.
- Lestari, V. 2014. Analisis Pengaruh Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Kediri Tahun 2012 dan 2013. *Skripsi*. Universitas Negeri Surabaya.

- Rahman, A. 2014. Menyikapi Pengalihan PBB-P2 ke Pemerintah Daerah. Diakses dari <http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2014/01/24/menyikapi-pengalihan-pbb-p2-ke-pemerintah-daerah-627064.html>, pada tanggal 15 April 2015.
- Sri Susilo, Y., F. Wisnu Isdaryadi, dan Y.B. Sigit Hutomo. 2010. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta Edisi Revisi*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Suandy, E. 2008. *Hukum Pajak edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suratman, E., Candra F.A., Hamid P., dan Artidiatun Adji. 2013. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. *Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah*. Tim Asistensi Kementerian Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Wahyudi, Eddi. 2012. Peluang dan Tantangan Devolusi PBB-P2 Bagi Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Sumbarja. Diakses dari <http://eddiwahyudi.com/2012/03/04/studi-kasus-devolusi-pbb-p2-peluang-dan-tantangan-bagi-pemda-kabupatenkota-di-provinsi-sumbarja/>, pada tanggal 16 Maret 2015.
- Radar Pekalongan. 2014. Lunas PBB-P2, Kades akan dapat Insentif dan Reward. Diakses dari <http://www.radarpekalonganonline.com/31655/lunas-pbb-p2-kades-akan-dapat-insentif-dan-reward/>, pada tanggal 27 Maret 2015.
- Mata Telinga. 2014. Penutupan Pekan Panutan PBB-P2 Sergai Hasilkan 1,2 Miliar. Diakses dari <http://matatelinga.com/view/Berita-Sumut/17108/Penutupan-Pekan-Panutan-PBB-P2-Sergai-Hasilkan-1-2-Miliar.html#.VT3GwPDdVp8>, pada tanggal 27 Maret 2015.